



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka diperlukan adanya suatu pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan di maksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan optimal, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
17. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Tahunan Pemerintah Kota Banjarmasin yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Banjarmasin, dengan jadwal kegiatan pengawasan dan obyek pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Jadwal dan obyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Banjarmasin serta berdasarkan kewenangan yang ada.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WILAYAH	BULAN											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
IRBAN I	Monitoring Jembatan Bromo	Reviu Laporan Keuangan SKPD	Evaluasi SAKIP SKPD	Reguler Dinas Pendidikan	Reviu RPJMD	Reviu Rancangan Akhir Renja SKPD TA 2021	ATT Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan	Bimtek	Reviu RKA SKPD TA 2022	Probity Audit Dinas PUPR	ATT Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Reviu DAK
	Reviu DAK	Bimtek	Pemeriksaan Reguler Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Reguler Dinas Perhubungan	Reviu Rancangan Akhir RKPDP 2021	Audit Kinerja DPPA (Kota Layak Anak)	ATT Dinas Koperasi UMTK	Reviu Renstra SKPD	Reviu RKPDP Perubahan SKPD TA 2021	Reviu Dak	Audit Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Penutupan Kas Akhir Tahun 2021
			Reviu DAK			Penutupan Kas Semester I	Reviu DAK					
IRBAN II	Stock opname persediaan SKPD	Reviu Laporan Keuangan SKPD T.A 2020	Evaluasi LAKIP SKPD Tahun 2020	Probity Audit	Audit Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Reguler Kecamatan Banjarmasin Selatan	Reviu Rancangan Akhir Renja SKPD TA. 2022	ATT Kecamatan Banjarmasin Tengah	Reviu RKA SKPD 2022	ATT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	ATT Satpol PP pada Bidang Satpol PP	ATT Kecamatan Banjarmasin Barat
		ATT Dana Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Utara				Reguler Dinas Penanaman Modal dan PTSP		Reguler BKD, Diklat		Penutupan Kas Semester I Tahun 2021	Reviu Renstra SKPD	ATT Kecamatan Banjarmasin Timur
IRBAN III	Stock Opname Barang Persediaan di 26 Puskesmas, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Reviu Laporan Keuangan SKPD TA 2020	Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2020	Probity Audit	Audit Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Reviu KUA-PPAS TA 2022	Reviu Renja SKPD Tahun 2022	Bimtek	Reviu RKA SKPD TA 2022	ATT Sekretariat DPRD	ATT Badan Keuangan Daerah	Reviu DAK
		Reguler Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	Reviu Laporan Keuangan Pemko TA 2020			Reguler Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				Audit Kinerja Dinas Kesehatan	ATT Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan TA 2020	Reviu DAK
				Penutupan kas Semester I	Reviu DAK							

Pemeriksaan Penanganan Pengaduan Masyarakat												
IRBANSUS	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Bagian Umum	Reviu Laporan Keuangan Setda Kota Banjarmasin Tahun 2020	Evaluasi Laporan Kinerja Setda Kota Banjarmasin Tahun 2020		Reviu Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2022	Penutupan kas Semester I	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Bagian Hukum	Reviu RKA Perubahan Tahun 2021	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Audit Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Penutupan Kas Semester II Tahun 2021
			Reviu Laporan Kinerja Pemko Banjarmasin Tahun 2020					Reviu RKA Tahun 2022				
			Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Banjarmasin Tahun 2020					Reviu Renstra SKPD				
SEKRETARIAT	Monitoring											

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA